

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan madrasah dapat dikelola secara bijaksana dari berbagai sumber dan digunakan untuk membiayai berbagai aspek pengelolaan organisasi, seperti pembayaran tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, pengelolaan dana memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana tetap sehat dan digunakan secara efektif, sehingga lembaga tersebut dapat bertahan dan meningkatkan kualitas pendidikannya.¹

MI Muhammadiyah 2 Badas memiliki tugas strategis untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang bernuansa Islam. Untuk mencapai visinya menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berakhlak mulia, sekolah memerlukan dana yang memadai. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahap yaitu perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (accounting), dan penilaian atau evaluasi (auditing). Biaya pendidikan terdiri dari dua komponen: total biaya pendidikan (total cost) dan biaya satuan per siswa.²

Aturan pembiayaan pendidikan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

¹ Rifdah Auva Apriliana et al., "Implementasi Manajemen Keuangan Madrasah Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 93–107, <https://doi.org/10.19109/elidare.v8i2.14425>.

² Taufik Taufik et al., "Islamic Education Funding Management at MTs Miftahul Ulum Jember," *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 7, no. 2 (2023): 261, <https://doi.org/10.29240/jsmp.v7i2.6999>.

tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007.

Sumber daya madrasah terutama berasal dari berbagai sumber, seperti komite sekolah, sumbangan sukarela dari orang tua siswa, dan hibah dari yayasan atau lembaga keagamaan. Namun, bergantung pada dana dari orang tua dan hibah eksternal dapat mengganggu stabilitas dan kesetaraan akses pendidikan.³

Kebanyakan madrasah masih bergantung pada sangat bergantung pada dana SPP dari dana BOS pemerintah untuk beroperasi. Ini menjadi masalah utama karena dana BOS sering diberikan terlambat. Hal ini berdampak langsung pada kelangsungan pendidikan dan biaya operasional seperti pengajar dan pemeliharaan fasilitas. Akibatnya, Madrasah tidak dapat memenuhi standar layanan pendidikan yang tinggi dan memastikan keberlangsungan aktivitas belajar mengajar jika dana yang lebih besar dan stabil tidak tersedia.⁴

Model pendanaan yang bergantung pada pihak eksternal dan tidak berkelanjutan adalah sumber masalah ini. MI Muhammadiyah 2 Badas harus menciptakan sumber pendapatan baru yang mandiri dan berkelanjutan untuk memecahkan rantai ketergantungan ini dan menciptakan kemandirian

³ Wawan Suranto and Setyo Nugroho, Analisis Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Swasta Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Smp Birrul Walidain Muhammadiyah Plupuh), 10 [2025]: 767–68

⁴ Aida Karimah and Mulyawan Safwandy Safwandy, “Analisis Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah,” Kharismatik : Jurnal Ilmu Pendidikan 1, no. 2 [2024]: 109

keuangan. Mendirikan usaha mandiri, atau unit usaha, adalah salah satu potensi yang dapat dilaksanakan. Sekolah melibatkan semua pemangku kepentingan komite, guru, orang tua, dan siswa dalam pengelolaan konsep ini sebagai unit bisnis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak uang yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program peningkatan kualitas sekolah.

Unit usaha tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan uang namun juga berfungsi sebagai laboratorium wirausaha di mana siswa dapat belajar tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan di MI Muhammadiyah 2 Badas, langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan adalah mendirikan usaha mandiri sekolah. Ini akan menjadi langkah yang mandiri dan berkelanjutan.

Bagi kepala madrasah, kewirausahaan menjadi salah satu dari 3 pilar kompetensi dasar yang harus dikuasai. Jalan untuk mencapai kemandirian bisa diperoleh dengan usaha-usaha tertentu baik memiliki profit atau tidak. Tentu usaha yang memiliki potensi pendapatan perlu lebih diutamakan agar memiliki dampak yang lebih bagi madrasah. madrasah yang mandiri merupakan sekolah yang faham apa yang harus dilakukan serta melaksanakan seluruh perihal yang harus dicoba tanpa bergantung pada pihak lain.⁵

Madrasah/sekolah memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat kualitas pembelajarannya untuk memberikan jaminan mutu kepada

⁵ Anis Sulkhan Fadlil, *Edupreneurship Untuk Mewujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi Melalui Pendirian Badan*, 4, no. 1 (2024): 7.

masyarakat dan wali murid secara spesifik, bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah tidak asal-asalan dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga kesan pendidikan mahal dengan kualitas yang baik akan dengan sendirinya terkikis oleh zaman dan tidak lagi menjadi trend masyarakat saat ini, apabila tata kelola entrepreneur madrasah/sekolah dalam memanfaatkan potensi diri madrasah/sekolah untuk bisa menjadi madrasah yang mandiri.⁶

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) bisa juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian madrasah. MBS merupakan pendekatan strategis dalam peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Melalui MBS, sekolah tidak hanya memperoleh kebebasan dalam merancang program Pendidikan yang relevan dengan kondisi masyarakat sekitar, tetapi juga bertanggung jawab secara penuh atas pencapaian hasil Pendidikan.⁷

Dengan adanya desentralisasi pengambilan keputusan, MBS mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola sekolah sehingga dapat memperkuat kemandirian sekolah dalam menjawab tantangan zaman termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan era Society 5.0. kebijakan ini menjadi pedoman penting bagi institusi Pendidikan untuk mengoptimalkan potensi yang ada demi mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

⁶ Mohammad Holis, *Tata Kelola Entrepreneur; Alternatif Pengembangan Madrasah Free Cost dan Mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan*, n.d., 148.

⁷ Abd Muiz et al., *Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi*, 2 [2024]: 48.

Penyelenggara unit bisnis oleh sekolah memiliki tujuan yang lebih luas dari pada sekedar menambah anggaran operasional. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar. Kontribusi untuk bisnis sekolah terhadap kualitas pendidikan dapat diamati dari segi manfaatnya, baik yang bersifat universal maupun spesifik.⁸

Pada tataran universal, kehadiran unit bisnis sekolah berperan dalam menyeimbangkan arus kas antara penerima dan belanja institusi. Kondisi finansial yang stabil ini memungkinkan terpenuhinya berbagai sarana pendukung kegiatan akademik sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal.

Sementara pada tataran spesifik manfaat yang dirasakan adalah terpenuhinya kepuasan komunitas sekolah terhadap fasilitas yang disediakan, yang kemudian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran aktivitas akademik dilingkungan sekolah. Yang selanjutnya, unit bisnis ini akan memperkuat citra sekolah sebagai lembaga yang mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta menjaga keberadaannya yang relevan.

Sebagai upaya menciptakan kemandirian finansial dan membedakan diri dari sekolah lain yang umumnya bergantung pada dana BOS dan SPP, MI Muhammadiyah 2 Badas harus mampu mengembangkan berbagai usaha mandiri sebagai sumber pendapatan sekolah agar menjadi keunikan tersendiri

⁸ Angga Kurniawan et al., "PENGELOLAAN USAHA MANDIRI SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN," *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 2, no. 3 (2019): 127, <https://doi.org/10.17977/um027v2i32019p126>.

bagi sekolah ini yang memiliki sumber pendapatan mandiri dan tidak lagi bergantung pada dana eksternal dari luar.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian proposal ini diantaranya:

1. Bagaimana strategi manajemen keuangan diterapkan dalam pengelolaan usaha mandiri untuk meningkatkan pendapatan sekolah di MI Muhammadiyah 2 Badas?
2. Bagaimana bentuk dan proses pengembangan usaha mandiri yang dilakukan oleh MI Muhammadiyah 2 Badas dalam upaya meningkatkan Pendapatan sekolah ?
3. Bagaimana dampak pengelolaan usaha mandiri terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian keuangan sekolah di MI Muhammadiyah 2 Badas Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian proposal ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui strategi manajemen keuangan diterapkan dalam pengelolaan usaha mandiri untuk meningkatkan pendapatan sekolah di MI Muhammadiyah 2 Badas
2. Untuk mengetahui bentuk dan proses pengembangan usaha mandiri yang dilakukan oleh MI Muhammadiyah 2 Badas dalam upaya meningkatkan Pendapatan sekolah

3. Untuk mengetahui proses pengelolaan usaha mandiri dampak pengelolaan usaha mandiri terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian keuangan sekolah di MI Muhammadiyah 2 Badas Kabupaten Kediri ?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis yang signifikan dengan berkontribusi pada pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan Islam dan Kewirausahaan Sosial. Secara spesifik, penelitian ini berpotensi melahirkan sebuah model teoritis baru tentang bagaimana lembaga pendidikan non-profit dapat membangun kemandirian finansial melalui unit usaha. Temuan ini akan memperkaya khasanah ilmu mengenai pemberdaya aset sekolah dan integrasi nilai-nilai kewirausahaan kedalam tata kelola sebuah sekolah Islam.
2. Manfaat praktis, penelitian ini langsung dapat dijadikan peta jalan oleh MI Muhammadiyah 2 Badas dan sekolah sejenis untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas pendidikan. Bagi pihak sekolah, strategi yang dihasilkan akan menciptakan kemandirian finansial, mengoptimalkan aset, dan membangun citra positif. Sementara bagi guru, masyarakat, dan lembaga Islam lain penelitian ini menjadi laboratorium kewirausahaan serta referensi berharga yang dapat diadaptasi untuk memicu inovasi dan ketahanan finansial di dunia pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Isi
1.	Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Anggara Prima, Abd Rachim, dan Satriah, “Strategi Pengelolaan Pendapatan dalam Mengoptimalkan Operasional Perguruan Tinggi Swasta” (2025).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha mandiri seperti program

		unggulan dan layanan keagamaan mampu meningkatkan pendapatan lembaga pendidikan secara signifikan. Diversifikasi sumber pendapatan melalui usaha mandiri dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal serta mendukung keberlanjutan finansial lembaga pendidikan.
	Persamaan Penelitian	1. Sama-sama membahas pengembangan usaha mandiri dalam lembaga pendidikan. 2. Sama-sama membahas peningkatan pendapatan dan kemandirian keuangan lembaga pendidikan. 3. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
	Perbedaan Penelitian	1. Penelitian peneliti berfokus pada strategi peningkatan pendapatan sekolah Islam melalui usaha mandiri di MI Muhammadiyah 2 Badas. 2. Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pengelolaan pendapatan di perguruan tinggi swasta.
2.	Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Edi Warmanto, "Pembiayaan Pendidikan Islam" (2024).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam memerlukan pengelolaan dana yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pesantren dan madrasah juga menunjukkan tingkat kemandirian keuangan melalui pengelolaan usaha dan dukungan masyarakat.
	Persamaan Penelitian	1. Sama-sama membahas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. 2. Sama-sama membahas pentingnya kemandirian keuangan lembaga pendidikan. 3. Sama-sama menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
	Perbedaan Penelitian	1. Penelitian peneliti lebih fokus pada strategi peningkatan pendapatan melalui usaha mandiri sekolah. 2. Penelitian terdahulu membahas pembiayaan pendidikan Islam secara umum pada madrasah dan pesantren.
3.	Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Nelly, "Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan)" (2021).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam harus dilakukan secara efektif dan efisien

		melalui perencanaan anggaran, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.
	Persamaan Penelitian	1. Sama-sama membahas manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam. 2. Sama-sama membahas pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 3. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
	Perbedaan Penelitian	1. Penelitian peneliti membahas strategi peningkatan pendapatan melalui pengembangan usaha mandiri sekolah. 2. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada optimalisasi anggaran pembiayaan pendidikan Islam.
4.	Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Fiska Apriliana, "Pengelolaan Pendapatan Sekolah Melalui Produksi Batik SMK Muhammadiyah Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara" (2022).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan sekolah diperoleh melalui produksi batik yang dikelola oleh guru, staf, dan alumni. Hasil penjualan dimanfaatkan untuk pengembangan jurusan, koperasi sekolah, serta mendukung peningkatan pendapatan sekolah melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
	Persamaan Penelitian	1. Sama-sama membahas strategi pengelolaan pendapatan pada lembaga pendidikan. 2. Sama-sama meneliti pemanfaatan unit usaha sekolah sebagai sumber pendapatan.
	Perbedaan Penelitian	1. Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan pendapatan melalui unit produksi batik. 2. Penelitian peneliti mengkaji strategi pengembangan beberapa unit usaha, sedangkan penelitian terdahulu hanya mengkaji satu unit usaha produksi batik.
5.	Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Elensya Eka Shintya Putri dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Pengaruh Keuangan Mandiri Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Pondok Pesantren An-Nashriyah Bahrul Ulum Tambakberas" (2024).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan mandiri berbasis syariah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi lembaga pendidikan serta membantu peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui

		pengelolaan usaha mandiri dan sumber daya internal secara efektif.
	Persamaan Penelitian	1. Sama-sama membahas kemandirian keuangan lembaga pendidikan Islam. 2. Sama-sama membahas usaha mandiri sebagai sumber pendapatan lembaga. 3. Sama-sama membahas pengelolaan keuangan untuk mendukung kualitas pendidikan.
	Perbedaan Penelitian	1. Penelitian peneliti dilakukan di MI Muhammadiyah 2 Badas Kabupaten Kediri. 2. Penelitian terdahulu dilakukan di pondok pesantren berbasis syariah.

F. Definisi Operasional

Manajemen keuangan sekolah dapat didefinisikan sebagai sistem terintegrasi pengelolaan dana, khususnya dana unit bisnis mandiri. Pelaksanaannya mencakup empat tahap kunci: perencanaan anggaran (RAPBS) yang mengakomodasi pendapatan bisnis, pencatatan transaksi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan pengeluaran sesuai dengan tujuannya untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, serta mekanisme pelaporan dan audit internal untuk transparansi. Sistem keuangan yang sistematis ini merupakan prasyarat untuk pengelolaan dana yang optimal dan bermakna demi kemajuan institusi.

Konsep jenis usaha mandiri yang dikembangkan merujuk pada berbagai bentuk kegiatan kegiatan yang digagas oleh sekolah. Kelayakan suatu usaha untuk diteliti ditentukan berdasarkan tiga tolak ukur. Usaha tersebut harus memiliki prospek keuangan yang menjanjikan dengan terget pasar yang terdefinisi, selaras dengan identifikasi keIslaman dan nilai edukatif yang ingin ditanamkan, serta mempertimbangkan kapasitas dan potensi sumber daya yang dimiliki sekolah, baik tenaga, fasilitas, maupun dukungan komunitas. Secara

praktis bentuk-bentuk usaha yang akan dikaji meliputi pengelolaan koperasi sekolah, kantin, serta pemanfaatan aset sekolah dengan menyewakan fasilitas tertentu.

Strategi pengembangan usaha mandiri didekati sebagai siklus manajemen yang saling berkesinambungan. Siklus ini dimulai dari formulasi strategi, yang meliputi perencanaan bisnis dan analisis kelayakan. Tahap selanjutnya adalah eksekusi, yang melibatkan pembagian tugas, peningkatan kapasitas SDM, penggalangan modal, dan upaya promosi. Tahap penutupnya adalah pengendalian inovasi, berupa evaluasi berkala terhadap pencapaian usaha dan upaya perbaikan serta pengembangan model bisnis untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutannya. Melalui rangkaian strategis ini pengembangan usaha mandiri dapat direalisasikan untuk secara konsisten mendukung pendapatan sekolah.